

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Anggadiredja Jana T., dkk. 2006. *Rumput Laut*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin, dkk, 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gunawan , Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Hadi, Sudharto P., 2004, *Dimensi sosial dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu, Semarang, UNDIP.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidjojo, Projojo, 2000, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta, Stensil.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Haar Teer, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hadjon, Philipus M, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya, Yuridika.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika.
- Kharlin, Ahmad, Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Ctk Pertama, Sinar Grafika.
- Muhdar, Muhamad, 2010, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum*, Balikpapan, Skripsi.

- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Ridwan, HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudarajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung,
- Ruchiyat, Eddy, 1990, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*, Bandung, Amrico.
- Ruwiastuti, Maria, Rita, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- _____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Status Hak Pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).
- _____, 2002, *Hukum Adat Indonesia*. Cet V, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sonny, Keraf A, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Supriharyono, 2002, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta,
- Susilo, Kasru, 2000, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan.

- Sumardjono, Maria S.W., 2018, *Pluralisme Hukum, Sumber Daya Alam Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, Universitas GadjahMada, Yogyakarta.
- Sutedi, Andrian, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Utrecht, E, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar.
- Utomo, Lakson, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Ctk Pertama, Raja Grafindo.
- Wulandari, Dewi, 2009. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung,PT. Refika Aditama.
- Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Wibisono, M. S, 2005, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Yogyakarta, Grasindo.
- Qalbi, Nur. 2008. *Analisis Hukum Terhadap Hak-hak Masyarakat Pesisir Dalam Usaha Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Bantaeng (skripsi)*. Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Karya Tulis Ilmiah, Majalah, Artikel dan Jurnal:

- Azni, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2019, *Kecamatan Magarabombang Dalam Angka*, CV. Bilal Jaya Mandiri, Takalar.
- Firdaus Fadillah, 2014, Fadillah Firdaus, 2014, *Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir untuk Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Takalar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, 2013, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Takalar*, Program PPSP Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Takalar (Sulawesi Selatan).

- Rigg, Kelly dan Tri Setyawanta, 2005, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Semarang, PSHL FH UNDIP.
- Sri Susianti Nur dan Abrar Saleng, 2013, *Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. Pendahuluan.
- Sugandhy, Aca, 2000, *Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, Bandung, FH UNPAD.
- Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, Bandung, FH UNPAD.
- Qalbi, Nur. 2008. *Analisis Hukum Terhadap Hak-hak Masyarakat Pesisir Dalam Usaha Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Bantaeng* (skripsi). Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

- Pemerintah Indonesia, 1994, Undang-Undang *Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia, 1992, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 *Tentang Penataan Ruang*, Lembaran RI Tahun 1992 No. 24. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia, 2007, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Lembaran RI Tahun 2007 No. 27. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia, 1960, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria*, Lembaran RI Tahun 1960 No. 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Indonesia, 2004, Nomor 16 tahun 2004 *tentang Penatagunaan Tanah*, Lembaran RI Tahun 2004 No. 16. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Indonesia, 2014, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran RI Tahun 2014 No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2002 *Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu*, 2002.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *tentang Penataan pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil*.
- Pemerintah Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2002, *Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu*, Jakarta.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 1013 *tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan*.

Website :

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, “Perikanan”, diakses dari <https://takalarkab.bps.go.id/subject/56/perikanan.html>, pada tanggal 29 Mei 2020.
- Berita website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia*, <https://jabarprov.go.id/>, diakses pada: 09 Februari 2020.
- Defenisi Menurut Para Ahli <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-rekomendasi-dan-contohnya/>, diakses pada 5 Juni 2020
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/106>, Diakses pada 30 Juni 2020.
- Google Gambar, *Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Takalar*, diakses dari <https://pn-takalar.go.id/main/images/stories/peta-takalar.jpg>, diakses pada 30 Juni 2020.
- Lifepal, 2019, Contoh-Contoh Surat Permohonan Berdasarkan Keperluannya <https://lifepal.co.id/media/suratpermohonan/#:~:text=Surat%20permohonan%20adalah%20surat%20yang,pihak%20lain%20atau%20instansi%20lain.> diakses pada 5 Juni 2020.
- Unit Pelaksanaan Teknis BPSPL Padang (Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang Direktorat Jenderal Pengadaan Ruang Laut-KKP), 2017, *Masyarakat Adat*, <http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat>, diakses pada 11 Februari 2020.
- Yance Arizona, 2015, *Mendefinisikan Indegenous Peoples di Indonesia*, <https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/>, diakses pada, 10 Februari 2020.